

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Instansi

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) merupakan salah satu instansi utama dalam struktur pemerintahan yang memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan, dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kemhan RI memiliki mandat penting dalam mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan demi mewujudkan pertahanan negara yang kokoh sebagai bagian dari upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Gambar 2.1 Logo Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

(Sumber data: www.kemhan.go.id, 2025)

Gambar 2.1 menampilkan Logo Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) yang memiliki tanggung jawab utama dalam bidang pertahanan negara. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan pertahanan nasional, Kemhan RI memiliki tugas pokok dalam menyusun, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan strategis di bidang pertahanan. Ruang lingkup tugas tersebut meliputi penyusunan strategi pertahanan negara, perumusan doktrin dan pedoman operasional, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan oleh seluruh elemen pertahanan, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan instansi pemerintah terkait lainnya. Seluruh kebijakan ini diarahkan

untuk membangun sistem pertahanan yang solid dan dinamis, mampu beradaptasi dengan tantangan masa kini dan masa depan, termasuk menghadapi ancaman-ancaman seperti serangan siber dan terorisme.

Kemhan RI dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Negara. Menteri Pertahanan memiliki kewenangan penuh dalam mengatur seluruh kebijakan dan program di bidang pertahanan, termasuk penetapan prioritas pembangunan kekuatan pertahanan, pengelolaan anggaran, serta pengawasan atas jalannya program-program strategis pertahanan negara.

Struktur organisasi Kementerian Pertahanan mencakup berbagai unit kerja mulai dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, hingga sejumlah Badan dan Pusat yang memiliki peran spesifik sesuai bidang tugasnya. Setiap unit tersebut bekerja secara terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan pertahanan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pengawasan dan evaluasi kebijakan.



Gambar 2.2 Logo Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
(Sumber data: www.kemhan.go.id/puslaik/, 2025)

Gambar 2.2 menampilkan Logo Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang merupakan satuan kerja teknis di bawah Kemhan RI. Pusat Kelaikan di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia merupakan satuan kerja teknis yang bernaung langsung di bawah Kementerian Pertahanan RI. Instansi ini memiliki peran vital dalam mendukung implementasi

kebijakan pertahanan nasional, terutama dalam aspek pengujian, sertifikasi, dan pengawasan mutu alat utama sistem senjata (alutsista) serta perangkat pendukung pertahanan lainnya. Keberadaan Pusat Kelaikan sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap alutsista dan perlengkapan militer yang akan digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun unsur pertahanan lainnya telah melalui proses uji kelaikan dan dinyatakan siap operasi sesuai regulasi yang berlaku.

Pusat Kelaikan bertanggung jawab melaksanakan serangkaian kegiatan teknis berupa inspeksi, pengujian performa, serta sertifikasi terhadap seluruh produk pertahanan, baik yang diproduksi dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Setiap peralatan yang akan diintegrasikan ke dalam sistem pertahanan negara wajib melewati proses sertifikasi sebagai langkah mitigasi risiko dan jaminan mutu. Dengan demikian, hanya peralatan yang memenuhi standar keamanan, keandalan, dan efektivitas yang akan dinyatakan layak untuk digunakan.

Sebagai instansi yang berfungsi mengontrol kualitas dan mengawasi standar teknis di sektor pertahanan, Pusat Kelaikan turut memastikan bahwa alutsista, sistem persenjataan, kendaraan tempur, serta sarana pendukung lainnya dapat beroperasi secara optimal dalam berbagai kondisi di lapangan. Proses ini penting untuk menjamin keselamatan prajurit, mendukung kelancaran pelaksanaan misi militer, sekaligus menjaga daya tahan dan keandalan sistem pertahanan nasional secara menyeluruh.

Dalam struktur organisasinya, Pusat Kelaikan diperkuat oleh beberapa unit utama yang menjalankan fungsi spesifik sesuai dengan domainnya masing-masing, yaitu Bidang Kelaikan Darat (IDLA), Bidang Kelaikan Laut (IDSA), dan Bidang Kelaikan Udara (IDAA). Ketiga bidang kelaikan ini memiliki tanggung jawab teknis sesuai lingkup operasionalnya:

1. Bidang Kelaikan Darat (IDLA) berperan dalam melaksanakan uji coba, pemeriksaan, dan sertifikasi kelaikan terhadap seluruh alutsista serta sarana pendukung yang dioperasikan dalam lingkup matra darat. Cakupan

tugasnya meliputi kendaraan tempur, sistem senjata darat, dan perangkat militer lainnya.

2. Bidang Kelaikan Laut (IDSA) memiliki kewenangan dalam menilai dan memberikan sertifikasi kelaikan teknis bagi kapal perang, sistem persenjataan laut, serta peralatan militer lainnya yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut maupun unsur pertahanan maritim.
3. Bidang Kelaikan Udara (IDAA) bertugas menjamin kelaikan pesawat tempur, helikopter, sistem senjata udara, serta perangkat pertahanan lain yang beroperasi di udara oleh TNI Angkatan Udara dan instansi terkait lainnya.

Ketiga bidang kelaikan tersebut bersinergi secara terpadu guna memastikan bahwa seluruh alutsista dan perangkat pertahanan yang digunakan memenuhi spesifikasi teknis, standar keamanan, serta ketentuan kelaikan sesuai dengan karakteristik setiap matra operasionalnya.

2.1.1 Visi Misi

Sebagai instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, serta keamanan negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) merumuskan visi dan misi sebagai pedoman utama dalam melaksanakan setiap program dan aktivitas di sektor pertahanan nasional.

a. Visi

Adapun visi yang diusung oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia adalah: "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong." Makna dari visi tersebut menunjukkan tekad kuat Kemhan RI untuk membangun bangsa Indonesia yang mampu berdiri secara mandiri dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan yang dimaksud mencakup tidak hanya pertahanan dan keamanan, tetapi juga penguasaan dalam bidang teknologi, ekonomi, dan sosial budaya. Semangat gotong royong dijadikan

pondasi utama dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa guna menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun global.

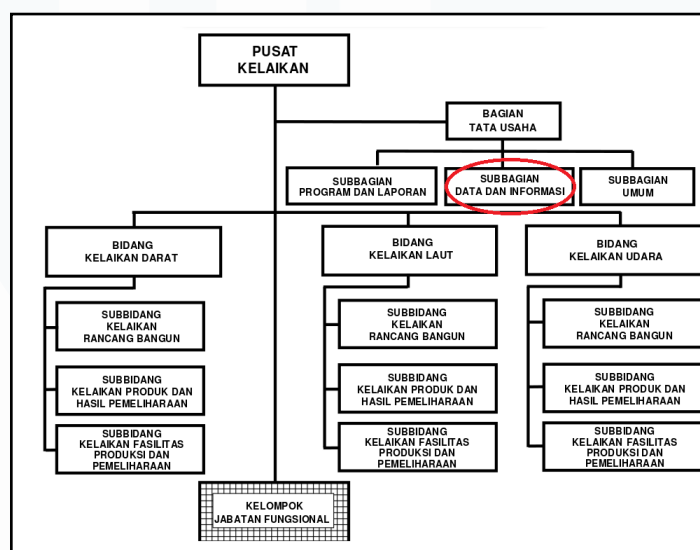
b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menetapkan sejumlah misi strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia, sekaligus mendukung kemandirian ekonomi nasional dengan mengamankan potensi sumber daya maritim, sebagai wujud kepribadian bangsa sebagai negara kepulauan.
2. Menciptakan masyarakat yang maju, berkelanjutan, dan demokratis dengan berlandaskan prinsip negara hukum, sehingga terbangun tatanan sosial yang adil dan sejahtera.
3. Mengimplementasikan politik luar negeri yang bebas dan aktif, sekaligus memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim yang kuat di kancah internasional.
4. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia agar menjadi bangsa yang unggul, maju, dan sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan.
5. Membangun bangsa yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala regional maupun global, guna menghadapi tantangan era modern dan persaingan antar bangsa.
6. Menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat, dengan berlandaskan pada kepentingan nasional yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan, sebagai cerminan jati diri bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur warisan budaya bangsa.

2.2 Struktur Organisasi Instansi

Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) merupakan satuan kerja yang memiliki peran penting dalam menjamin kelayakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta fasilitas pendukung pertahanan negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Kelaikan didukung oleh struktur organisasi yang terintegrasi dan saling mendukung guna memastikan seluruh program kerja terlaksana secara optimal.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi

(Sumber data: www.kemhan.go.id/puslaik/, 2025)

Gambar 2.3 menampilkan struktur organisasi Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Satuan Kerja ini dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Kelaikan yang membawahi Bagian Tata Usaha. Bagian ini berperan sentral dalam mendukung kelancaran kegiatan administrasi dan operasional di lingkungan Pusat Kelaikan. Bagian Tata Usaha terdiri dari tiga subbagian, yakni Subbagian Program dan Laporan, Subbagian Data dan Informasi, serta Subbagian Umum. Subbagian Program dan Laporan memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun perencanaan program kerja serta mengelola laporan kegiatan secara sistematis dan terukur.

Sementara itu, Subbagian Data dan Informasi bertugas mengelola berbagai data dan informasi yang dihasilkan maupun yang diperlukan oleh Pusat Kelaikan. Proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian data menjadi fokus utama subbagian ini, termasuk dalam mendukung sistem pelaporan dan dokumentasi kinerja organisasi. Peserta magang yang ditempatkan di Subbagian Data dan Informasi dilibatkan langsung dalam kegiatan pengelolaan data untuk mendukung kelancaran distribusi informasi di lingkungan Pusat Kelaikan.

Adapun Subbagian Umum berperan dalam mengelola urusan administrasi umum, kepegawaian, hingga perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga organisasi. Subbagian ini memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan setiap unit kerja agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan efisien.

Selain Bagian Tata Usaha, Pusat Kelaikan juga memiliki tiga bidang utama yang masing-masing berfokus pada aspek penilaian kelaikan alutsista, yaitu Bidang Kelaikan Darat, Bidang Kelaikan Laut, dan Bidang Kelaikan Udara. Ketiga bidang ini bertugas melakukan uji kelaikan teknis alutsista sesuai dengan jenis matra masing-masing. Setiap bidang menaungi tiga subbidang teknis yang memiliki peran strategis, antara lain Subbidang Kelaikan Rancang Bangun, Subbidang Kelaikan Produk dan Hasil Pemeliharaan, serta Subbidang Kelaikan Fasilitas Produksi dan Pemeliharaan.

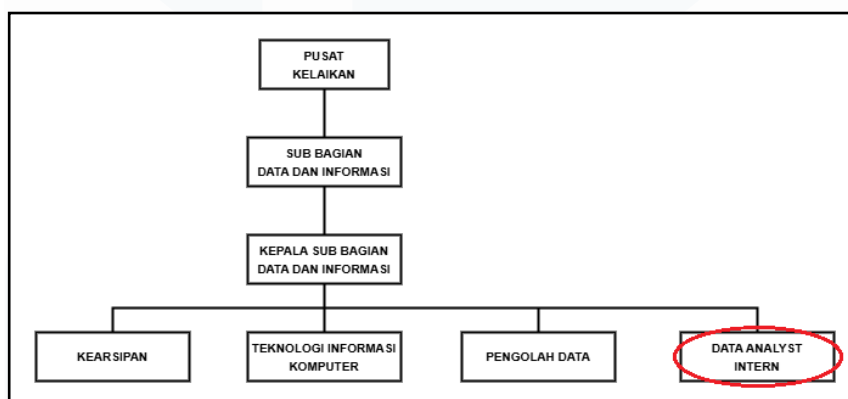
Subbidang Kelaikan Rancang Bangun bertugas melakukan verifikasi dan penilaian terhadap desain teknis maupun spesifikasi alutsista atau fasilitas pertahanan yang akan diproduksi. Penilaian ini penting dilakukan guna memastikan bahwa setiap rancangan telah sesuai dengan standar dan ketentuan teknis yang berlaku, sehingga mampu menjamin keamanan dan kehandalan sistem secara keseluruhan.

Subbidang Kelaikan Produk dan Hasil Pemeliharaan berperan menilai kelayakan hasil produksi alutsista maupun hasil dari proses perawatan dan perbaikan. Tujuannya adalah memastikan bahwa produk akhir maupun hasil

pemeliharaan tetap memenuhi standar kelaikan dan siap dioperasikan dalam mendukung misi pertahanan negara.

Sedangkan Subbidang Kelaikan Fasilitas Produksi dan Pemeliharaan memiliki tugas utama dalam menilai kesiapan dan kelayakan fasilitas produksi serta fasilitas pemeliharaan yang digunakan dalam proses pembuatan maupun perawatan alutsista. Penilaian ini penting agar fasilitas yang digunakan tetap memenuhi standar keamanan, efektif dalam mendukung proses produksi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam struktur organisasi Pusat Kelaikan juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga ahli dengan kompetensi di bidang teknis tertentu. Kelompok ini berperan mendukung proses penilaian kelaikan sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga memperkuat kualitas hasil kerja Pusat Kelaikan.



Gambar 2.4 Struktur Departemen Sub Bagian Data dan Informasi

(Sumber data: Dokumentasi Pribadi, 2025)

Gambar 2.4 menampilkan struktur Departemen Sub Bagian Data dan Informasi Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pusat Kelaikan berperan sebagai unit tertinggi yang memiliki tanggung jawab dalam membimbing serta mengawasi sub bagian di bawahnya. Sub Bagian Data dan Informasi sendiri merupakan bagian penting yang berfungsi dalam pengelolaan aspek data, informasi, dan teknologi. Unit ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang memiliki peran

utama dalam mengatur kegiatan operasional serta menjadi penghubung antara pimpinan pusat dengan tim pelaksana di bawah koordinasinya.

Pada struktur tersebut, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi membawahi empat unit kerja fungsional yang memiliki tugas masing-masing, yaitu Kearsipan, Teknologi Informasi Komputer, Pengolah Data, serta *Data Analyst*. Unit Kearsipan bertugas dalam pengelolaan dokumen dan arsip. Unit Teknologi Informasi Komputer menangani segala kebutuhan terkait sistem komputer dan infrastruktur digital. Unit Pengolah Data berfokus pada pemrosesan, pembersihan, dan validasi data. Sementara itu, peran *Data Analyst* mendukung kegiatan analisis data, dan sekaligus berkontribusi dalam proses transformasi digital. Penempatan posisi intern ini juga menunjukkan adanya sinergi antara pembinaan SDM dan program pemagangan dalam lingkup instansi pemerintah.